

**ANALISA SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA)
KABUPATEN SIDOARJO**

Summary

Dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran (2017-2019), volume SiLPA di masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Volume SiLPA pada Masing-Masing OPD
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017-2019

NAMA OPD	SiLPA			
	2017	2018	2019	RERATA
Dinas PUBMSDA	255.684.501.796	228.687.616.929	287.701.178.753	257.357.765.826
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.114.844.471	188.098.963.302	161.709.042.826	139.307.616.866
Dinas Rumkim CKTR	39.116.961.416	15.689.268.041	166.144.445.936	73.650.225.131
Dinas Kesehatan	43.579.610.807	45.401.240.548	77.985.552.488	55.655.467.948
RSUD	29.635.972.574	37.472.829.882	86.671.413.929	51.260.072.128
BPKAD	2.752.569.725	749.070.715	104.761.150.922	36.087.597.121
DLHK	18.628.431.205	39.353.466.871	42.523.939.256	33.501.945.777
Sekretariat DPRD	3.104.301.987	19.674.733.118	25.250.566.984	16.009.867.363
Sekretariat Daerah	-	7.966.405.767	9.931.808.348	8.949.107.057
Dinas Perhubungan	1.373.469.588	4.295.411.932	18.134.250.411	7.934.377.310
Dinas Pangan dan Pertanian	3.713.745.823	11.348.273.889	7.295.419.737	7.452.479.816
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.701.745.601	5.780.709.506	5.137.652.055	4.540.035.721
Bagian Umum	4.434.867.785	-	0	4.434.867.785
Dinas P3AKB			3.796.016.133	3.796.016.133
Badan Kepegawaian Daerah	1.574.421.321	1.710.605.486	5.065.484.213	2.783.503.673
BAPPEDA	1.615.370.096	1.870.094.089	3.094.478.709	2.193.314.298
Kecamatan Sidoarjo	1.204.864.738	1.075.381.843	3.883.317.352	2.054.521.311
BPBD	1.680.022.939	1.576.960.449	2.883.292.429	2.046.758.606
Dinas PORAPAR	1.452.249.398	2.254.238.949	2.357.655.740	2.021.381.362
Dinas Perikanan	1.476.041.921	1.547.615.968	2.890.915.670	1.971.524.520
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.366.461.128	1.116.637.074	2.369.476.664	1.617.524.955
Satpol PP	1.423.023.669	1.037.817.490	2.198.261.001	1.553.034.053
Dinas PMDP3AKB	1.170.463.452	3.469.635.309	0	1.546.699.587
Dispendukcapil	828.873.575	1.142.896.425	2.114.881.751	1.362.217.250
BPPD	1.124.314.888	1.406.409.920	0	1.265.362.404
Kecamatan Porong	436.344.112	464.434.864	2.774.166.950	1.224.981.975
Dinas Sosial	819.088.306	633.381.384	2.002.430.260	1.151.633.317
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.158.942.686	980.822.841	1.300.078.625	1.146.614.717

NAMA OPD	SiLPA			
	2017	2018	2019	RERATA
Dinas PMPTSP	178.978.404	585.887.845	2.596.905.048	1.120.590.432
BAKESBANGPOL	628.116.478	515.292.800	2.048.713.044	1.064.040.774
Dinas PMD			1.016.253.029	1.016.253.029
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	698.441.904	699.556.355	1.437.066.920	945.021.726
Kecamatan Taman	632.452.104	371.793.812	1.600.038.638	868.094.851
Dinas Tenaga Kerja	303.178.304	551.245.981	875.094.071	864.759.178
Inspektorat	457.475.415	717.358.829	1.169.806.893	781.547.046
Kecamatan Jabon	703.642.202	309.151.473	540.165.254	517.652.976
Bagian Organisasi	516.253.406	-	0	516.253.406
Kecamatan Tulangan	209.205.395	208.753.764	714.676.542	377.545.234
Kecamatan Krian	279.610.510	249.937.356	560.476.754	363.341.540
Bagian Perekonomian	362.339.607	-	0	362.339.607
Kecamatan Krembung	202.885.824	263.023.018	580.580.795	348.829.879
Kecamatan Prambon	176.016.731	196.798.871	608.772.087	327.195.896
Kecamatan Sedati	136.234.908	80.496.895	712.084.001	309.605.268
Kecamatan Tanggulangin	310.044.049	157.403.088	446.266.597	304.571.245
Kecamatan Waru	193.979.453	132.156.006	568.665.056	298.266.838
Bagian Pemerintahan	282.950.804	-	0	282.950.804
Kecamatan Candi	180.129.296	78.444.795	567.463.789	275.345.960
Kecamatan Tarik	89.045.835	184.751.948	548.714.351	274.170.711
Kecamatan Balongbendo	218.665.078	69.580.269	398.634.445	228.959.931
Kecamatan Sukodono	26.345.039	65.173.298	562.018.799	217.845.712
Kecamatan Buduran	57.167.002	46.185.589	520.091.523	207.814.705
Kecamatan Gedangan	80.130.236	109.122.740	430.934.249	206.729.075
Bagian PBJ	196.094.043	-	0	196.094.043
Kecamatan Wonoayu	5.303.350	20.133.776	560.476.754	195.304.627
Bagian Hukum	192.179.070	-	0	192.179.070
Bagian Kesra	168.862.970	-	0	168.862.970
Bagian Pembangunan	166.634.226	-	0	166.634.226
Bagian Protokol RT	112.501.108	-	0	112.501.108
JUMLAH	497.936.367.758	630.417.171.098	1.049.040.775.781	

Penyebab internal (dari dalam OPD sendiri) terjadinya SiLPA kebanyakan disebabkan oleh terjadinya efisiensi dalam pengadaan/belanja barang dan jasa serta belanja modal. Di samping disebabkan oleh efisiensi, SiLPA di beberapa OPD juga disebabkan oleh keterbatasan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain disebabkan oleh dua faktor (efisiensi dan keterbatasan SDM) sebagaimana disebutkan di atas, SiLPA di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terjadi karena berbagai macam faktor seperti dirinci di bawah ini:

1. Adanya efisiensi dari hasil pengadaan/belanja barang dan jasa serta belanja modal (**Disporpar, BPKAD, Bappeda, PMD, Bag Perekonomian, Setda, Diskominfo**)
2. Terbatasnya personel atau pegawai yang bersertifikat barang dan jasa, serta kurangnya tenaga keuangan/admin di masing-masing bidang (**Dispanperta, Dinkes, BPBD**)
3. Pekerjaan-pekerjaan fisik dianggarkan pada saat perubahan anggaran sehingga durasi waktu antara terbit DPA perubahan (Oktober) dan batas waktu penyerapan anggaran (Desember) sangat terbatas (**DLHK**)
4. Untuk pekerjaan-pekerjaan fisik, dokumen pengadaan dan pekerjaan tidak diselesaikan diawal sehingga terjadi penumpukan pekerjaan pada triwulan 4 (**DLHK**)
5. Kegiatan Bimtek yang semula direncanakan mengundang Kepala OPD dan Pengurus Barang, namun kemudian undangan hanya untuk Kepala OPD sehingga penyerapan anggaran Bimtek banyak yang tidak terserap (**BPKAD**)
6. Beberapa pengadaan barang dan jasa tidak memerlukan honor tim pengadaan (**BPKAD**)
7. Ketidackermatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai penempatan alokasi anggaran (**Disperindag**)
8. Kesalahan dalam penempatan alokasi anggaran per triwulan (**Disperindag**)
9. Banyaknya kegiatan di triwulan I s/d III yang masih belum terlaksana di triwulan IV, sehingga kegiatan menumpuk pada triwulan IV (**Disperindag**)
10. Selisih antara Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Nilai Pagu (pagu berdasarkan ASB) sehingga menyebabkan terjadinya SiLPA (**DisPerkim CKTR**)
11. Adanya Keterbatasan waktu karena adanya PAK (**Bappeda**)
12. Adanya penyesuaian harga/belanja sesuai dengan harga pasar atau penganggaran lebih tinggi dari harga pasar (**PMD, Dispanperta**)
13. Untuk pemeliharaan mesin absensi tidak terealisasi karena tidak ada kerusakan (**PMD**)
14. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional tidak terealisasi karena kendaraan dalam keadaan rusak (**PMD**)
15. Kegiatan pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi tidak terserap karena mesin tidak ada kerusakan (**PMD**)
16. Tidak ada agenda rapat, sehingga tidak bisa menyerap anggaran makanan dan minuman (mamin)(**Bag Pembangunan**)
17. Manajemen waktu pelaksanaan/penyerapan yang tidak dilaksanakan (rencana anggaran tidak sesuai pelaksanaan kegiatan (**Dispanperta**)
18. Adanya duplikasi anggaran (**Dispanperta**)
19. pada pelaksanaan pembangunan fisiknya sering terjadi perubahan desain yang diakibatkan kurang koordinasi antara bidang perencana dengan bidang pelaksana fisik (**Dinas PUBMSDA**)
20. Kegiatan SPPD Anggota DPRD tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan yang mengakibatkan anggaran SPPD tidak terserap (**Set DPRD**)
21. Kurang tepatnya perencanaan anggaran pada pos belanja sehingga belanja yang tidak terpakai atau tidak dibutuhkan tetap ada pada DPA (**BPBD**)
22. Silpa pada tahun 2017 sebagian besar disebabkan oleh belanja dana BOSREG yang penganggarnya menggunakan estimasi jumlah siswa sesuai dapodik (**Dispendik**)
23. Silpa pada tahun 2018 sebagian besar disebabkan oleh penyerapan belanja tidak disesuaikan dengan jumlah PNSD sedangkan pada tahun tersebut banyak pegawai yang pensiun dan tidak adanya perekrutan CPNS (**Dispendik**)

24. Silpa pada tahun 2018 sebagian besar disebabkan oleh penyerapan honor PTT dan penjaga SMPN yang tidak dapat dilakukan karena belum adanya SK dari Bupati (**Dispendik**)

5.2. Sebab-Sebab Eksternal Terjadinya SiLPA

Dari sisi eksternal, terjadinya SiLPA di OPD-OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh faktor yang lebih beragam antara lain:

1. Untuk paket-paket pekerjaan fisik diatas 200jt perlu dilakukan proses lelang, akan tetapi waktu dalam proses tersebut tidak mencukupi (**DLHK**)
2. Dalam mengerjakan pekerjaan fisik tidak maksimal baik mutu dan kualitas bangunannya (**DLHK**)
3. Karena perubahan mekanisme dan tata cara penyerapan anggaran (**Disporpar**)
4. Hasil evaluasi dan koordinasi antar OPD tentang pelaksanaan program (**Disporpar**)
5. Efisiensi penyerapan anggaran oleh pihak ke 3 terutama pada proses lelang (**Disporpar**)
6. Honor tidak diserap karena tidak dilaksanakannya pengadaan Pendampingan oleh KJPP (**BPKAD**)
7. Belum dilaksanakannya rapat terkait penilaian besaran sewa BMD dikarenakan belum adanya usulan dari OPD (**BPKAD**)
8. Untuk kendaraan yang dipinjam pakai OPD maka biaya perpanjangan STNK dan pajak kendaraan menjadi tanggung jawab OPD pemakai (**BPKAD**)
9. Regulasi yang masih belum jelas (misal tentang pemanfaatan pajak Rokok) (**Dinkes**)
10. SiLPA BLUD yang selalu dipasang pada saat PAK sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi (**Dinkes**)
11. Juknis BOK atau DAK yang terlambat (**Dinkes**)
12. Sisa lebih dari lelang atau pengadaan secara e-catalog (**Dinkes**)
13. Kurangnya koordinasi PPKom dalam penyerapan anggaran DAK (**Disperindag**)
14. Kesalahan dalam penganggaran, SSH yang dipilih tidak tepat sehingga anggaran tidak bisa terserap (**Disperindag**)
15. DAK untuk bidang perindustrian senilai Rp. 2.658.103.620,00 yang akan dipergunakan untuk revitalisasi Tanggulangin untuk tahun 2018 tidak dapat terserap dikarenakan Lahan yang akan dikerjakan masih banyak kendala (**Disperindag**)
16. Adanya selisih antara Nilai Pagu, Nilai HPS, dan Nilai Kontrak sehingga menyebabkan terjadinya SiLPA (**DisPerkim CKTR**)
17. Permintaan pembayaran untuk pengiriman Diklat/pelatihan dari OPD-OPD, hal tersebut berpengaruh pada penyerapan belanja Biaya pengiriman, Perjalanan Dinas luar daerah dan uang saku peserta (untuk TA 2017, 2018 dan 2019) (**BKD**)
18. Adanya penundaan pelaksanaan Lelang Jabatan sehingga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja pengiriman/pelatihan teknis, belanja mamin, belanja jasa pemeriksaan/*Chek Up*, belanja narasumber PNS dan Non PNS (Utk TA 2018) (**BKD**)
19. Adanya penghematan dari pelaksanaan pengadaan CPNS TA 2018 (jumlah pelamar lebih sedikit dari perkiraan). Sedangkan untuk TA 2019 SILPA disebabkan adanya jadwal awal pelaksanaan CPNS yang mundur sehingga seluruh anggaran hanya terserap hanya untuk pelaksanaan Seleksi administrasi saja (tahapan SKD dan SKB belum terlaksana) (**BKD**)
20. Mayoritas lambatnya serapan anggaran terjadi dikarenakan proses pengadaan barang dan jasa (tender) yang memakan waktu beberapa bulan (**Bappeda**)
21. Regulasi baru berpengaruh terhadap serapan anggaran pada SKPD (**Bappeda**)
22. Anggaran SPPD tidak terserap untuk kegiatan penyiapan rumusan bahan kebijakan pemerintahan desa dan kelurahan karena sudah dianggarkan di Desa (**PMD**)

23. Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan KB (DAK) untuk pengadaan Mobil Box tidak bisa direalisasikan karena anggaran tidak mencukupi dengan harga mobil yang direncanakan sesuai dengan spesifikasi juknis yang ada **(PMD)**
24. Kegiatan advokasi, koordinasi, pembinaan dan evaluasi PUG untuk pengadaan jasa konsultasi profil data terpilah tidak terealisasi karena proses pengadaannya tidak sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 **(PMD)**
25. Kegiatan koordinasi, fasilitasi dan monev pemanfatan sumber daya, TTG dan usaha ekonomi masyarakat karena untuk gelar TTG biaya dekorasi tidak cukup dan anggaran SPPD tidak cukup sehingga tidak dilaksanakan **(PMD)**
26. Kegiatan pembinaan dan pelayanan KB (DAK) karena menyesuaikan juknis yang ada dan pelaksanaannya disesuaikan dengan regulasi daerah yang berlaku **(PMD)**
27. Tidak ditemukan barang / jasa yang sesuai dengan spesifikasi, sehingga tidak diserap, karena jika ingin diserap pun akan menjadi aset yang kurang bermanfaat atau tidak difungsikan **(Bag Pembangunan)**
28. Ada beberapa infrastruktur penunjang yang belum terpenuhi dalam KAK 2019 **(Dispanperta)**
29. Spesifikasi barang yang diinginkan tidak ada di pasaran **(Dispanperta)**
30. Penganggaran kembali SILPA tahun sebelumnya yang pelaksanaannya sudah tidak menjadi kewenangan OPD **(Dispanperta)**
31. Ada pembebasan lahan yang pelaksanaannya banyak berhubungan langsung dengan warga /masyarakat misalnya ada beberapa pihak yg tidak setuju dengan nilai kompensasi pembebasan lahan yang berdampak pada dana pembebasan tidak terserap **(Dinas PUBMSDA)**
32. Desain perencanaan sering terjadi perubahan karena usulan dari pihak desa sehingga berpengaruh pada waktu yang dibutuhkan dalam proses lelang **(Dinas PUBMSDA)**
33. Banyaknya kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD dan tahun 2019 merupakan tahun Pemilihan Umum dengan adanya Pergantian Anggota DPRD yang baru mengakibatkan banyaknya rapat yang dilaksanakan dalam pembuatan program kerja baru dan menunggu Anggota DPRD wajib mengikuti Bimtek Orientasi **(Set DPRD)**
34. Adanya juknis DAK menu yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada menyesuaikan kegiatan pusat dan propinsi (Bid KBKK, Bid PPPA) **(Dinas P3AKB)**
35. Kegiatan yang berhubungan dengan kebencanaan (kondisi masih tenang) **(BPBD)**
36. Keterlambatan realisasi belanja modal atau pengadaan barang jasa yang berhubungan dengan pihak ketiga (lelang) **(BPBD)**
37. Adanya penurunan harga pada saat pembelanjaan **(Bag Perekonomian)**
38. Gagal Lelang, terutama gagal lelang pengadaan bus sebanyak 3 kali **(Setda)**
39. Tahun 2017 terdapat belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan kantor, dikarenakan anggaran yang didapat merupakan pelimpahan dari beberapa dinas **(Diskominfo)**
40. Tahun 2018 ada belanja yang tidak dapat direalisasikan karena harus menunggu rekomendasi dari dinas pemberi rekomendasi **(Diskominfo)**

5.3. Kewajaran Besaran (Volume) SiLPA

Terkait besaran SiLPA yang ada, semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengatakan bahwa volume SiLPA yang terjadi di OPD-OPD tersebut masih dalam batas 'wajar'. Para OPD berpendapat demikian dengan didasari oleh beragam argumentasi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Apabila dipaksakan untuk dikerjakan, maka hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut tidak bisa optimal pemanfaatannya **(DLHK)**
2. Karena besaran SILPA berdasarkan ketentuan efisiensi pembelanjaan **(Disporapar)**

3. Sebagian besar kinerja telah berhasil tercapai dan banyaknya faktor eksternal yang berpengaruh pada SILPA yang ada (**BPKAD**)
4. Sisa anggaran terbesar berasal dari Dana DAK, dimana untuk tahun 2018 tidak terlaksana karena banyak kendala di lapangan, dan di 2019 adalah SILPA lelang yang berarti terdapat efisiensi realisasi belanja (**Disperindag**)
5. Serapan belanja rata - rata mencapai 80% adalah suatu kewajaran (**Bappeda**)
6. Semua kegiatan sudah dilaksanakan dan adanya SiLPA karena efisiensi dan penyesuaian harga pasar (**PMD**)
7. Besaran SiLPA sudah dibawah angka 5% (**Bag Pembangunan**)
8. Besaran SiLPA masih dibawah 25% (**Dispanperta**)
9. Besaran SiLPA masih sesuai dengan koridor yang berlaku (**Dinas Perikanan**)
10. dipengaruhi oleh sisa penawaran dan pekerjaan yang batal pelaksanaannya sehingga diperlukan pengkajian ulang dalam pelaksanaannya (**Dinas PUBMSDA**)
11. Kegiatan Anggota DPRD tidak bisa diprediksi karena keputusan/kebijakan politik (**Set DPRD**)
12. Dikarenakan oleh standar pusat dan daerah tidak sama sehingga penyerapan anggaran disesuaikan dengan ketentuan standar yang ada di daerah (**Dinas P3AKB**)
13. Prosentase penyerapan anggaran tahun 2019 untuk belanja langsung diatas 80% sedangkan tahun 2018 sebesar 90% (**BPBD**)
14. SiLPA hanya dari sisa pembelanjaan (**Bag Perekonomian**)
15. Total realisasi sudah mencapai lebih dari 80%. (**Dispendik**)
16. Besaran SiLPA masih wajar mengingat APBD Kabupaten Sidoarjo yang sangat besar (**Diskominfo**)

5.4. Volume SiLPA dan Kapasitas SDM

Apabila dihubungkan antara volume SiLPA dengan kapasitas SDM di OPD dalam mengelola anggaran, terdapat perbedaan pandangan di antara OPD-OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Sebagian OPD menganggap bahwa volume Program dan Kegiatan beserta besaran anggarannya **masih sesuai dengan kapasitas SDM** yang ada. Para OPD yang berpendapat demikian ini antara lain adalah **Disporapar, Disperindag, Bappeda, Set DPRD, Dinas P3AKB, Bag Perekonomian, Setda, Dispendik, dan Diskominfo.**

Di sisi lain, beberapa OPD menyatakan bahwa volume Program dan Kegiatan beserta anggaran yang harus dikelola oleh OPD **sudah melebihi kemampuan SDM** yang bekerja di OPD-OPD tersebut. Beberapa OPD yang berpendapat seperti ini antara lain adalah: **DLHK, BPKAD, Dinkes, PMD, Bag Pembangunan, Dispanperta, Dinas PUBMSDA, dan BPBD.**

5.5. Strategi untuk Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran dan Meminimalisir Terjadinya SiLPA

Hampir semua OPD di Pemkab Sidoarjo telah mempunyai strategi untuk meminimalisir terjadinya SiLPA serta mengoptimalkan penyerapan anggaran. Ragam strategi yang telah diterapkan oleh OPD-OPD untuk optimalisasi penyerapan anggaran itu antara lain adalah:

1. Mentaati *schedule* pembagian triwulan dalam dokumen anggaran (**DLHK**)
2. Menyusun perencanaan secara komprehensif berdasarkan ketentuan yang ada (**Disporapar**)
3. Melakukan penjadwalan dan mekanisme penyerapan anggaran sesuai dengan program (**Disporapar**)

4. Koordinasi secara terus menerus dengan bidang yang mengusulkan anggaran serta menginformasikan terkait batas waktu penyerapan anggaran (**BPKAD**)
5. Membuat perencanaan yang optimal sesuai sumber daya yang tersedia (**Dinkes**)
6. melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dengan memberikan nota dinas kepada tiap bidang yang berisi perkembangan penyerapan anggaran hingga dua minggu sebelum akhir triwulan (**Disperindag**)
7. Melaksanakan monitoring melalui rapat yang dihadiri PPKom dan PA untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan yang sudah dan belum dilaksanakan (**Disperindag**)
8. menyampaikan informasi serapan anggaran (berupa nota dinas) kepada PPKom dan PPTK pada setiap bulan serta mengingatkannya pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam DPA (**BKD**)
9. Koordinasi percepatan serapan anggaran secara terus menerus (**Bappeda**)
10. Evaluasi setiap triwulan terkait kendala - kendala yang dihadapi dan pemecahannya (**Bappeda**)
11. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktunya (triwulan penganggaran) (**PMD**)
12. Melakukan percepatan pengadaan barang/jasa, yaitu dengan memastikan spesifikasi teknis lengkap seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (**PMD**)
13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan anggaran (**PMD**)
14. Mengoptimalkan koordinasi dan meminimalisir belanja modal (**Bag Pembangunan**)
15. Melaksanakan kegiatan/pengadaan sesuai *time schedule* yang telah dibuat (**Dispanperta**)
16. Meningkatkan kompetensi pegawai (**Dispanperta**)
17. Memperbaiki sistem perencanaan anggaran (**Dispanperta**)
18. Memanfaatkan secara optimal Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Pelaporan mengelola hibah/Bansos secara lebih terintegrasi dengan mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Administrasi Hibah Bansos serta penerapan Sistem Non Tunai untuk seluruh transaksi (**Dinas Perikanan**)
19. Pada sisa anggaran regular diolah kembali untuk dialokasikan paket pekerjaan yang penganggarnya dialokasikan pada PAK (**Dinas PUBMSDA**)
20. Mereviu rencana kerja yang telah ditetapkan (**Set DPRD**)
21. Lebih meningkatkan koordinasi dengan Anggota DPRD agar program kerja dilaksanakan tepat waktu dan sasaran (**Set DPRD**)
22. Mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan (**Set DPRD**)
23. Selalu mengadakan rapat koordinasi dengan Pejabat dan Staf Admin pengelola Keuangan dalam mengevaluasi/mengoptimalisasi penyerapan anggaran (**Set DPRD**)
24. Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala (**Dinas P3AKB**)
25. Perencanaan *time schedule* yg tepat dalam penyerapan anggaran (**BPBD**)
26. Anggaran digunakan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien (**Bag Perekonomian**)
27. Evaluasi internal setiap akhir triwulan (**Setda**)
28. Melakukan koordinasi dan evaluasi kegiatan ke semua bidang secara berkala dan berkelanjutan (**Dispendik**)
29. Merencanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan masing-masing bidang (**Diskominfo**)

5.6. Efektivitas Strategi untuk Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran dan Meminimalisir Terjadinya SiLPA

Dari strategi yang telah diterapkan oleh masing-masing OPD dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, ada 2 (dua) OPD yakni **DLHK** dan **Bappeda** yang menyatakan bahwa strategi yang dijalankan telah berhasil dengan ‘**sangat efektif**’.

Selain 2 OPD di atas, sebagian besar OPD di Pemkab Sidoarjo menyatakan bahwa strategi yang diterapkan untuk meminimalisir terjadinya SiLPA telah berjalan secara ‘**efektif**’ atau ‘**cukup efektif**’ sebagaimana yang terjadi di OPD-OPD **Disporapar, BPKAD, Disperindag, DisPerkim CKTR, BKD, Dinas PUBMSDA, PMD, Dispanperta, Dinas P3AKB, BPBD, Bag Perekonomian, Setda, Dispendik, Diskominfo, dan Bag Pembangunan.**

Di luar OPD-OPD tersebut di atas, terdapat 1 OPD yakni **Dinas Kesehatan** yang menyatakan bahwa strategi yang telah diterapkan untuk meminimalisir terjadinya SiLPA hasilnya adalah ‘**tidak efektif**’. Hal ini karena di satu sisi harus menyesuaikan perencanaan dengan sumber daya yang ada tapi tuntutan program harus diselesaikan berapapun SDM yang tersedia.

5.7. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya untuk Mengoptimalkan Penyerapan Anggaran serta Meminimalisir Volume SiLPA

Terkait dengan efektivitas strategi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan minimalisasi terjadinya SiLPA, OPD-OPD di Pemkab Sidoarjo menghadapi beragam faktor yang menjadi penghambat efektivitas strategi mereka. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum ada kesepakatan dalam menentukan spesifikasi pekerjaan atas pekerjaan fisik (**DLHK**)
2. Perubahan mekanisme dan tata cara penyerapan anggaran (**Disporapar**)
3. Perubahan target kinerja karena dinamika masyarakat (**Disporapar**)
4. Untuk faktor-faktor internal telah bisa diminimalisir dengan upaya yang telah dilaksanakan, namun kurang/belum efektif jika untuk faktor-faktor eksternal (**BPKAD**)
5. Penetapan DAK yang mepet di akhir tahun (**Dinkes**)
6. Penetapan dan sosialisasi regulasi yang terlambat (**Dinkes**)
7. SDM yang terbatas (**Dinkes**)
8. Faktor lain diluar dugaan seperti pandemi Covid-19 (**Dinkes**)
9. Kekurangcermatan saat proses penganggaran (**Disperindag**)
10. Kinerja penyerapan yang tidak optimal dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 sehingga kegiatan dan anggaran menumpuk untuk diselesaikan dan diserap di triwulan IV (**Disperindag**)
11. Biasanya yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor eksternal (**BKD**)
12. Adanya tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sehingga kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan (**Bappeda**)
13. Rencana kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan (**PMD**)
14. Kualitas SDM yang masih kurang (**PMD**)
15. Kurangnya usaha untuk melaksanakan realisasi semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (**PMD**)
16. Realisasi anggaran yang kurang maksimal dan tidak tepat waktu (**PMD**)
17. Faktor eksternal yang berupa kebijakan dari pusat yang mempengaruhi program dan kegiatan (**Bag Pembangunan**)
18. Terjadinya keadaan kahar (*force major*) (**Dispanperta**)
19. Kelemahan pada rencana atas tahapan pelaksanaan kegiatan (**Dispanperta**)
20. Alokasi pada PAK biasanya mendekati periode akhir tahun yang artinya paket pekerjaan yang diusulkan pada PAK terkendala dalam proses pelaksanaan karena waktu yang tidak mencukupi (**Dinas PUBMSDA**)
21. Koordinasi yang dilakukan tidak selalu diikuti Pejabat dan Staf Admin pengelola keuangan secara lengkap (**Set DPRD**)

22. Keputusan dan atau kebijakan yang diambil secara Politik (**Set DPRD**)
23. Adanya Juknis yang standar anggarannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada di daerah (**Dinas P3AKB**)
24. Kegiatan yang harus menyesuaikan kegiatan Pusat atau Provinsi (**Dinas P3AKB**)
25. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM serta kurangnya perencanaan jadwal kegiatan yang tepat (**BPBD**)
26. Adanya belanja yang tidak bisa diprediksi terutama untuk mamin dan perjalan dinas (**Bag Perekonomian**)
27. Faktor dari eksternal seperti gagal lelang (**Setda**)
28. Adanya faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi (**Dispendik**)
29. Terdapat beberapa pos anggaran yang seharusnya tidak dianggarkan namun terpaksa tetap dianggarkan mengingat jika tidak dianggarkan akan menghambat rutinitas kegiatan kantor (**Diskominfo**)

6.2. Rekomendasi

Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran serta meminimalisir terjadinya SiLPA, OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai macam strategi yang telah diterapkan. Namun strategi-strategi tersebut ada yang efektif serta banyak juga yang kurang efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut direkomendasikan beberapa metode yang bisa dipertimbangkan untuk dijadikan alternatif strategi dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran dan minimalisasi volume SiLPA:

1. Melakukan penjadwalan dan mekanisme penyerapan anggaran serta mentaati *schedule* pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan anggaran.
2. melakukan reuiu, pemantaun (monitoring) dan evaluasi secara terencana, periodik dan berkesinambungan tentang penyerapan anggaran serta mendiseminasikan hasil monev tadi melalui rapat yang dihadiri pihak-pihak terkait terutama PPKom dan PA untuk menginformasikan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan yang sudah dan belum dilaksanakan
3. menyampaikan informasi serapan anggaran melalui nota dinas kepada PPKom dan PPTK minimal setiap bulan serta mengingatkannya pelaksanaan kegiatan agar sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam DPA
4. Melakukan koordinasi secara terus menerus untuk percepatan serapan anggaran dengan berbagai pihak terkait terutama bidang yang mengusulkan anggaran, yang kemudian diikuti dengan informasi mengenai batas waktu penyerapan anggaran
5. Melakukan percepatan penyerapan anggaran untuk pengadaan barang/jasa dengan tidak mengesampingkan aspek spesifikasi teknis lengkap seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
6. Meningkatkan kompetensi pegawai secara efektif, terarah, dan berkelanjutan terutama kepada pegawai yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penyerapan anggaran
7. Memperbaiki sistem perencanaan anggaran dengan memanfaatkan secara optimal Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Anggaran melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer
8. Apabila terjadi sisa anggaran regular sebaiknya dimanfaatkan kembali untuk dialokasikan pada paket pekerjaan yang penganggarannya dialokasikan melalui PAK
9. Ada baiknya Kepala Daerah memikirkan untuk merancang dan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif (semacam *reward* and *punishment*) untuk menstimulasi dan memotivasi masing-masing OPD agar meningkatkan kinerja penyerapan anggarannya.